



Seminar Dies ke-22 Fakultas Sastra
“Pergulatan Multikulturalisme di Yogyakarta
dalam Perspektif Bahasa, Sastra, dan Sejarah”

MULTIKULTURALISME DI INDONESIA MENGHADAPI WARISAN KOLONIAL

oleh

Hilmar Farid



Universitas Sanata Dharma Yogyakarta | 27 April 2015

MULTIKULTURALISME DI INDONESIA MENGHADAPI WARISAN KOLONIAL

Hilmar Farid

Meletakkan Sudut Pandang

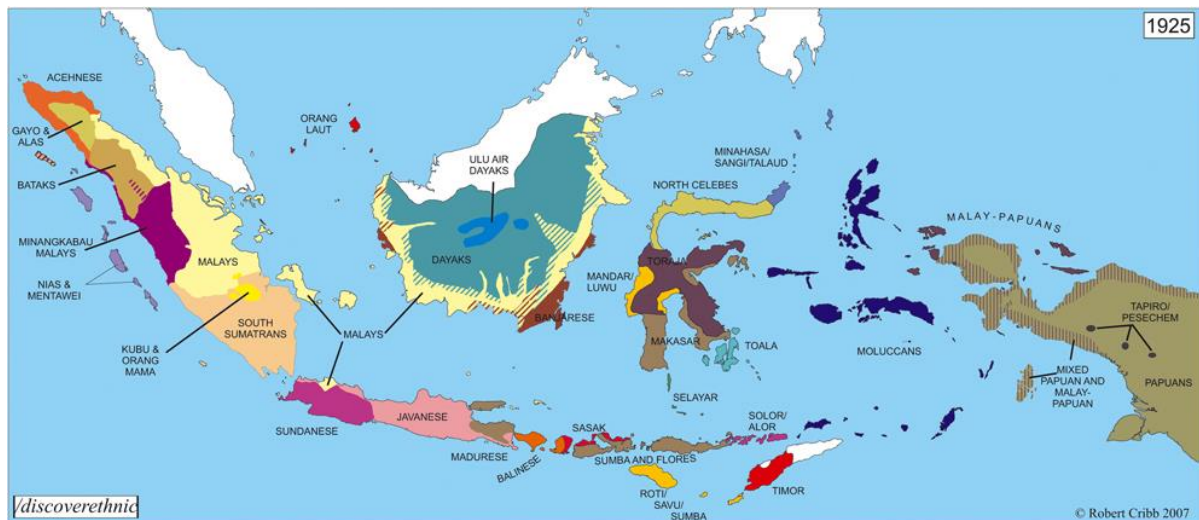
- Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk. Penduduknya terdiri atas beragam kelompok etnik dengan agama dan sistem yang beragam pula. Keadaan masyarakat seperti ini dibentuk oleh perjalanan sejarah yang sangat panjang dan berliku, mengingat adanya beberapa gelombang migrasi dalam kurun dua ribu tahun terakhir. Identitas etnik seperti halnya identitas agama pada dasarnya adalah produk sejarah yang sangat dinamis dan cenderung berubah dari waktu ke waktu, dan membawa kita pada pertanyaan sangat mendasar: apakah kelompok etnik atau kelompok penganut agama bisa kita bedakan secara jelas satu sama lain? Atau sesungguhnya perbedaan itu bersifat *elusive*?
- Multikulturalisme adalah cara pandang mengenai bagaimana kita sebaiknya menangani perbedaan dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia. Mengapa perbedaan perlu ditangani? Tidak lain karena, setidaknya dalam beberapa dekade terakhir, perbedaan ini menjadi sumber ketegangan dan konflik yang menghambat perkembangan masyarakat. Konflik sektarian yang merebak sejak 1990an adalah contoh yang gamblang tentang bagaimana perbedaan etnik dan agama bisa berkembang sedemikian rupa, mengoyak *social fabric* dan akhirnya mengancam kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri. Multikulturalisme dianggap sebagai bentuk intervensi yang tepat untuk menangkal konflik seperti itu.
- Saya tidak yakin dengan kemampuan multikulturalisme dalam menangkal konflik apalagi untuk menjawab masalah yang menjadi penyebab konflik itu karena alasan konseptual maupun politik. Will Kymlicka, pemikir liberal yang mengusung konsep multikulturalisme, mengatakan bahwa di samping hak asasi manusia yang melekat pada individu, ada pula *group differentiated rights* yang melekat pada kelompok masyarakat. Masalahnya pengertian budaya di sini bersifat statis - sebagai syarat untuk merumuskan budaya tersebut dalam kerangka hak atau *rights* - dan cenderung *reified*. Konsekuensi politiknya kemudian sangat serius karena budaya yang *reified* justru mempertajam perbedaan yang coba diatasi.
- Reifikasi praktik kebudayaan menjadi esensi kebudayaan, menurut saya, adalah masalah utama dari multikulturalisme. Jika memang ingin menjembatani atau mengelola konflik karena perbedaan maka hal yang harus dicegah adalah tafsir tunggal yang a-historis terhadap kenyataan historis. Di Eropa saat ini pemerintah yang semula antusias mendorong multikulturalisme seperti Inggris dan Jerman, juga sudah mulai meninggalkan konsep dan praktek multikulturalisme karena terbukti tidak dapat mengatasi krisis. Di Indonesia kita juga memerlukan perangkat konseptual dan agenda aksi baru, dan uraian singkat berikut saya harap bisa memberi kontribusi pada upaya tersebut.

Akar Masalah: Krisis Sosial-Ekologi

- Multikulturalisme berusaha mengelola dan menjembatani perbedaan budaya sehingga tidak berkembang menjadi konflik. Tapi apakah benar sumber konflik adalah perbedaan budaya atau perbedaan cara hidup? Pertanyaan ini penting agar kita mengenali *locus* dari masalah yang ingin diurus. Perbedaan memang bisa menjadi sumber konflik, tapi mengapa mesti perbedaan budaya? Bagaimana dengan perbedaan sosial lainnya seperti kelas atau gender? Hubungan antar etnik dan antar agama dalam banyak masyarakat sudah berlangsung selama ratusan tahun dan senantiasa mengalami pasang surut, tapi apakah ada kualitas tertentu yang melekat pada kebudayaan sehingga cenderung mengarah pada konflik?
- Saya berpendapat sumber konflik di Indonesia, dan juga banyak belahan dunia lain, yang nampak seperti konflik etnik atau agama sesungguhnya adalah konflik sosial di sekitar perebutan sumberdaya. Pergeseran kepemilikan tanah dan penggusuran yang masif, menurunnya tingkat pendapatan akibat inflasi, berkurangnya subsidi yang membuat orang semakin rentan, menyempitnya ruang sosial di perkotaan - kesemuanya adalah bagian dari krisis sosial-ekologis yang lebih luas- termasuk sumber konflik utama di Indonesia selama sekitar duapuluh tahun terakhir. Tapi masalahnya bukan pada krisis itu sendiri melainkan pada cara masyarakat mencari jawaban terhadap krisis. Kampanye kekerasan sektarian dalam konteks ini adalah jawaban yang diberikan sebagian orang terhadap krisis sosial-ekologis di atas.
- Pertanyaannya kemudian mengapa identitas etnik dan agama menjadi menonjol? Untuk menjawab pertanyaan ini kita perlu memahami apa disebut *colonial time bomb* yang ditinggalkan oleh penguasa kolonial setelah kemerdekaan dan belum berhasil dijinakkan sampai sekarang.

Pembagian Ras dan Etnik Sebagai Warisan Kolonial

- Sejak pertengahan abad kesembilan belas penguasa kolonial mulai membuat klasifikasi penduduk berdasarkan ras dan etnik dalam rangka memudahkan pengawasan dan pengaturan dalam masyarakat. Orang Tionghoa, Arab dan India misalnya cenderung hidup berkelompok dan dikendalikan oleh seorang pemimpin yang diberi pangkat militer oleh penguasa kolonial, seperti mayor, kapten dan letnan. Pangkat itu menunjukkan fungsi mereka sebagai pemimpin dan penegak hukum sekaligus. Orang pribumi diperlakukan sama sebagai orang pribumi. Baru pada awal abad keduapuluh muncul kesadaran untuk memetakan perbedaan etnik di kalangan orang pribumi. Pada 1925 terbit *Volkenkaart van Nederlandsch Indie* yang menandai batas-batas etnik secara geografis.



- Peta ini yang kemudian menjadi dasar bagi penguasa kolonial dan juga kalangan terpelajar pribumi untuk berpikir tentang penyebaran kelompok etnik secara spasial di Indonesia. Perbedaan etnik yang mungkin dirasakan secara konkret dalam kehidupan sehari-hari diabstraksi dan dianggap sebagai sebuah kenyataan 'objektif'. Inilah *colonial time bomb* yang detaknya masih terus kita rasakan sampai sekarang misalnya dalam gejala pemekaran daerah yang masif sejak adanya UU Otonomi pada 1999. Sejak UU itu keluar sekurangnya sudah ada tujuh provinsi, 173 kabupaten dan 35 kota baru. Klaim para pendukung pemekaran wilayah ini kadang berlandaskan pada sentimen etnik dan/atau klan yang mengacu pada sejarah.
- Penguasa kolonial menggunakan sistem *indirect rule* artinya menguasai penduduk dengan menggunakan tangan para penguasa pribumi. Sistem hukum yang digunakan untuk mengatur masyarakat bersangkutan juga adalah apa yang disebut sebagai 'hukum adat'. Tapi karena praktik 'hukum adat' ini begitu bervariasi maka terjadilah proses abstraksi: penguasa kolonial membentuk apa yang disebut *adatrechtskringen* atau lingkaran hukum adat dengan mengambil elemen-elemen yang mirip untuk disatukan dan selanjutnya dikodifikasi menjadi 'hukum'. Dan hukum inilah yang kemudian digunakan untuk mengatur hubungan sosial dalam masyarakat.
- Pemisahan sosial berdasarkan ras dan etnik ini berkait-kelindan dengan pemisahan sosial dan spasial. Orang Tionghoa misalnya semakin kukuh sebagai sebuah komunitas yang berbeda dari orang pribumi dan bahkan orang Asia lainnya. Mereka memiliki aturan hukum sendiri, perilaku sosial dan kultural sendiri, dan juga lembaga pendidikan serta pranata sosial sendiri. Secara spasial mereka tinggal di perkampungan yang disebut Pecinan, yang agak eksklusif, dan bahkan menjalankan kegiatan ekonomi yang mirip pula. Kenyataan historis yang spesifik ini kemudian melahirkan berbagai stereotip yang dianggap sebagai kenyataan umum.

Republik Menjawab

- Di hadapan sidang BPUPKI 1 Juni 1945 Sukarno menjelaskan landasan filosofis dari negara Indonesia yang merdeka. Dalam pidato yang kemudian diberi judul 'Lahirnya Pancasila' Sukarno mengatakan bahwa masyarakat Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa dengan latar belakang berbeda-beda pula. Syarat untuk menjadi sebuah bangsa menurutnya ada tiga hal, yakni (1) adanya pengalaman yang sama, (2) adanya kehendak untuk bersatu dan (3) adanya kesatuan antara orang dan

tempat/ruang. Tapi syarat ini hanya bisa mewujudkan menjadi kenyataan jika ada *kerja* yang menterjemahkan pengalaman, kehendak dan kenyataan spasial itu. Dalam kerja itu, yang disebutnya gotong-royong, perbedaan bisa diatasi dan membentuk kesatuan. Ini adalah esensi dari semboyan *bhinneka tunggal ika*.

- Konsep kerja/karya untuk mengatasi perbedaan sangat signifikan dan sesuai dengan konsep kebudayaan sebagai sesuatu yang dinamis dan terus berubah. Persatuan dicapai bukan karena adanya titik-titik singgung dari entitas yang berbeda-beda tapi karena adanya kontribusi terhadap sebuah *project* bersama yang disebut Indonesia. Fokus perhatian dengan begitu berpindah dari kualitas yang melekat pada seseorang atau sebuah kelompok menjadi pada apa yang dapat dan mungkin dilakukan bersama. Perbedaan etnik dan agama dengan begitu tidak lagi menonjol dan bahkan tidak signifikan dalam keseluruhan *project*.
- Tentu cara pandang seperti ini tidak berkembang begitu saja. Ada syarat dasar yang memungkinkan cara pandang ini berkembang yakni keadilan sosial. Ketimpangan sosial adalah sumber perbedaan sosial dan salah satu alat identifikasi perbedaan yang paling mudah adalah apa yang melekat pada seseorang. Multikulturalisme dalam hal ini tidak membantu mengalihkan proses identifikasi tersebut tapi justru mempermudah proses tersebut. Tapi sebaliknya saya juga tidak setuju dengan prinsip asimilasi yang ingin mengaburkan dan melebur perbedaan. Cara pandang seperti itu juga a-historis karena berusaha menutup mata terhadap perbedaan yang nyata. Perbedaan bagaimanapun harus diakui, dipahami dan ditangani dengan tujuan untuk memperkuat kolektivitas yang lebih besar, yakni *bangsa*, sehingga dapat membawa keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Perjuangan Keadilan Sosial

- Di jantung perjuangan untuk merawat masyarakat majemuk seperti Indonesia adalah perjuangan untuk menegakkan keadilan sosial karena sumber dari konflik sektarian yang mencabik *social fabric* tidak lain adalah ketimpangan sosial. Dalam konteks Indonesia sekarang kerja keras untuk mengatasi kesenjangan, ketimpangan dan ketidakadilan sosial adalah bagian penting, jika bukan yang terpenting, dari keinginan untuk melahirkan masyarakat yang lebih toleran dan beradab. Perjuangan ini juga perlu ditempatkan dalam konteks historis yang lebih luas karena masalah yang ingin ditangani tidak lain adalah warisan dari masa kolonial yang belum berhasil diselesaikan oleh republik.